



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR: 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penjelasan beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penjelasan beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tanggal 16 Juni 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015
- KESATU** : Merubah Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,**



**MAT NAWIR**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 41 /Kpst/KPU-Kab-012.329512/2015  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-  
 Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN  
 TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN  
 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**A. Syarat Calon**

1.	Model BB.1-KWK	Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati
----	----------------	--

**B. Berita Acara Perseorangan**

1.	Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.3.1-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
2.	Model BA.3.2-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.3.2-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara

**C. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima**

1.	Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP- KWK	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2.	Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3.	Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

**SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../ ..... Tahun
- f. Alamat : .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati .....
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
  - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
  - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

B. KHUSUS

1. Berhenti dari jabatan sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota \*) yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

2. Memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD\*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota\*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\*).

3. mengundurkan diri sebagai

- a. anggota Tentara Nasional Indonesia,
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
- c. Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

4. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Yang membuat pernyataan  
Calon Bupati / Wakil Bupati \*)**

Materai

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) beri tanda [ V ] pada kotak yang tersedia jika sesuai

\*\*\*) hanya diisi oleh pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik.

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OLEH PPS**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....

2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana pada **LAMPIRAN MODEL BA 3.1-KWK PERSEORANGAN**.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**LAMPIRAN  
MODEL BA.3.1-KWK  
PERSEORANGAN**

**TABEL I  
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera pada surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak memenuhi syarat usia dan/atau status perkawinan atau status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri		
	<b>Jumlah</b>		

**Keterangan :**

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

**TABEL II  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS**

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2- KWK Perseorangan kolom 8	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <i>belum memenuhi syarat (BMS)</i> dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

.....  
PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OLEH PPS

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana pada **Tabel I, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN**.

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama, sebagaimana pada **Tabel II, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN**.

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua, sebagaimana pada **Tabel III, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN**.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU / Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**TABEL I  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN BA.3.1-KWK Perseorangan, Tabel II, Angka 4	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak menyatakan dukungannya</b> tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak dapat ditemui</b>	
8	<b>Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5</b>	

**TABEL II  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam <b>Tabel I angka 8</b>	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak hadir</b> pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
8	<b>Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)</b>	

**TABEL III**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak menyatakan dukungannya</b> tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
a	tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
b	tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
c	dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena <b>tidak datang ke PPS</b> sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	<b>Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)</b>	

.....  
PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten ..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU Kabupaten .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati : .....

Nama Calon Wakil Bupati : .....

**A SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN</b>						
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Keurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

**B SYARAT CALON**

**1 NAMA CALON BUPATI :** .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DII					
	c DIII					
	d DIV					
	e S1					
	f S2					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Fotokopi KTP					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
6	Pas Foto :					
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2 NAMA CALON WAKIL BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DII					
	c DIII					
	d DIV					
	e S1					
	f S2					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik)					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Fotokopi KTP					
6	Pas Foto :					
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

Wonogiri, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	.....
2		Anggota	.....
3		Anggota	.....
4		Anggota	.....
5		Anggota	.....

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten ..... telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU Kabupaten .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nama Calon Bupati : .....

Nama Calon Wakil Bupati : .....

**A SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN</b>						
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

**B SYARAT CALON**

**1 NAMA CALON BUPATI : .....**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DII					
	c DIII					
	d DIV					
	e S1					
	f S2					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Fotokopi KTP					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
6	Pas Foto :					
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2 NAMA CALON WAKIL BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DII					
	c DIII					
	d DIV					
	e S1					
	f S2					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Fotokopi KTP					
6	Pas Foto :					
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian					
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

\*) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Wonogiri, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	.....
2		Anggota	.....
3		Anggota	.....
4		Anggota	.....
5		Anggota	.....

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

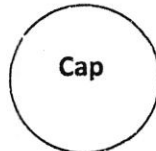
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

**Yang Menyerahkan**

**Yang Menerima**



.....  
Nama lengkap dan tanda tangan

.....  
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**LAMPIRAN  
MODEL TT.1-KWK**

**1. Identitas Calon Bupati**

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

**2. Identitas Calon Wakil Bupati**

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

**3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran**

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

*(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)*

**4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*) pengusul :**

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

**A SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN</b>						
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

**B SYARAT CALON**

**1 CALON BUPATI**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b Dii			
	c DiH			
	d DIV			
	e S1			
	f S2			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
5	Fotokopi KTP			
6	Pas Foto :			
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*)	Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	2		
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b DII			
	c DIII			
	d DIV			
	e S1			
	f S2			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
5	Fotokopi KTP			
6	Pas Foto :			
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*)	<i>Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</i>			

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

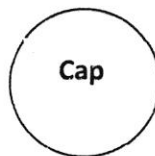
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., .....

**Yang Menyerahkan**

**Yang Menerima**



.....  
Nama lengkap dan tanda tangan

.....  
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
----------------------------

**1. Identitas Calon Bupati**

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

**2. Identitas Calon Wakil Bupati**

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

**3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran**

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

*(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)*

**4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*) pengusul :**

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

**A SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN</b>						
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

**B SYARAT CALON**

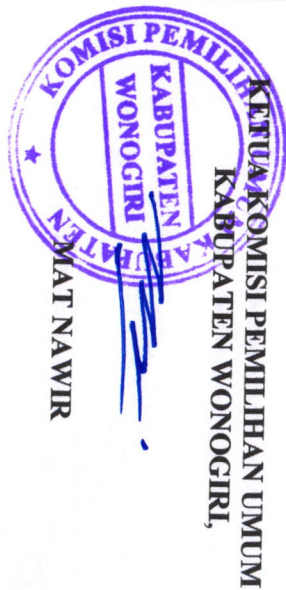
**1 CALON BUPATI**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b DII			
	c DIII			
	d DIV			
	e S1			
	f S2			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
5	Fotokopi KTP			
6	Pas Foto :			
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*)	Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	2		
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b DII			
	c DIII			
	d DIV			
	e S1			
	f S2			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KEERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
5	Fotokopi KTP			
6	Pas Foto :			
	a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
7	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD			
9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c Surat Keputusan Pemberhentian			
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*)	Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			